



Tantangan Dan Peluang Percepatan Pengembangan BUMDES Menuju Status Berkembang Dan Maju Di Kabupaten Cilacap

Putri Yuni Astuti^{1*}, Yuri Fitriyani Tamala², Ade Yunita Mafruhah^{3*}

¹²³Universitas Islam Bandung

*Penulis Koresponden, email: ade.yunita.mafruhah@unisba.ac.id

Diterima: 19-04-2022

Disetujui: 14-05-2022

Dipublikasi: 21-05-2022

Abstrak

Kabupaten Cilacap memiliki 269 desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mempercepat pengembangan potensi desa yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif serta fokus terhadap tantangan dan peluang percepatan pengembangan BUMDes menuju status berkembang dan status maju. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes di Kabupaten Cilacap mempunyai berbagai kendala yang berpotensi menjadi sebuah hambatan dalam pengelolaan BUMDes. Permasalahan bagi pengelolaan BUMDes yang ditemukan di semua dimensi melalui kriteria pengembangan BUMDes, yaitu : 1) cakupan pasar yang masih terbatas, 2) keterbatasan modal, dan 3) aset. Sedangkan dari kriteria yang terdapat status tumbuh dan status maju yaitu menjadi titik kelemahan pada indikator aset. Hal ini terdapat suatu kesulitan untuk menjalankan pembangunan usaha baru dan keterbatasan inovasi dalam membangun produk lokal.

Kata Kunci: BUMDes; Percepatan Pengembangan; Tantangan dan Peluang; Status Berkembang; Status Maju;

Abstract

Cilacap Regency has 269 villages. The existence of Village Owned Enterprises (BUMDes) is expected to accelerate the development of village potential that is able to improve the community's economy. This research uses qualitative descriptive and focuses on the challenges and opportunities of accelerating bumdes development towards developing status and advanced status. The results of this study show that most BUMDes in Cilacap Regency have various obstacles that have the potential to become an obstacle in the management of BUMDes. Problems for the management of BUMDes are found in all dimensions through bumdes development criteria, namely: 1) limited market coverage, 2) capital limitations, and 3) assets. Meanwhile, from the criteria that there is a growing status and advanced status, which is a weakness point in the asset indicator. This is a difficulty to carry out **new** business development and limited innovation in building local products.

Keywords: BUMDes; Development Acceleration; Challenges and Opportunities; Developing Status; Advanced Status;

Pendahuluan

Indonesia termasuk negara berkembang yang dimana melakukan banyak program pembangunan di setiap daerah, salah satunya Pemerintah Indonesia memberikan perhatian bagi wilayah terendah dalam struktur ketatanegaraan yaitu Desa. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa yakni sebuah organisasi Pemerintah terkecil, terendah, terpenting dan paling dekat dengan masyarakat (Nurkholis, Istifianah, dan Rahman 2020; Ubi Laru dan Suprojo 2019).

Majunya suatu negara tergantung pada desanya, karena suatu negara tidak maju maka tidak mungkin negara tersebut maju, tanpa kabupaten/kota yang maju maka tidak akan ada provinsi, dan tanpa desa/kota yang maju tidak akan ada kabupaten/kota. Keuntungan dari adanya desa dapat berkompetensi secara global melalui pemanfaatan hasil potensi-potensi desa yang mampu mendorong perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, salah satunya pemerintah membentuk program yang dapat mendukung pembangunan desa yaitu dengan adanya BUMDes. BUMDes salah satu lembaga yang dibentuk melalui pemerintah serta masyarakat untuk mengatur perekonomian di tingkat desa. Tujuan BUMDes didirikan untuk mengembangkan wilayah desa, yang dicapai melalui adanya program peningkatan produktivitas untuk pemberdayaan masyarakat serta keragaman sebuah usaha di pedesaan, menyediakan fasilitas yang dapat membantu perekonomian desa, membentuk dan mempertahankan lembaga yang dapat mendorong adanya rantai produksi serta perdagangan untuk optimalisasi SDA, serta mendorong tumbuhnya perekonomian di pedesaan.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh BUMDes yang ada di Kabupaten Cilacap selama ini yaitu pertama, tidak ada struktur organisasi yang belum terlihat jelas di desa sehingga belum bisa berkembang. Kedua, belum jelas program kerja BUMDes karena pengurus belum paham dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi dari setiap pengelola. Peningkatan ekonomi pedesaan seharusnya diawali dengan diberikannya legalitas yang tepat, maka dari itu Badan Usaha Milik Desa dapat memperlihatkan

perannya sebagai satu upaya menumbuhkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan meningkatkan ekonomi pedesaan secara utuh serta menyeluruh. Ketiga, belum disediakan lahan untuk kantor BUMDes yang representatif, kantor masih menumpang dengan balai desa sehingga terkesan tidak memadai. Keempat, adanya perencanaan dalam penguatan untuk kelembagaan di tingkat desa dari ekonomi kolaboratif yang kurang baik dan belum diakomodir dengan baik oleh pemerintah, oleh karena itu memerlukan bantuan dari beberapa pihak baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi atau institut/lembaga yang terkait dengan BUMDes.

Terdapat juga kendala yang dihadapi yaitu pertama dari sudut pengembangan dalam kelembagaan ekonomi tingkat desa dengan adanya perencanaan awal yang baik merumuskan dalam program atau usulan kegiatan, terutama untuk kalangan memiliki usaha yang dapat menumbuhkan sumber penghasilan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dengan adanya program pelatihan dan memperkuat pembangunan ekonomi tingkat desa. Kedua, dari sudut pembangunan, diperlukan adanya perencanaan awal bagi masyarakat untuk memperkuat berbagai potensi kelembagaan ekonomi desa yang dimiliki masyarakat, dan pentingnya sosialisasi dari pemerintah desa serta lembaga yang terkait melalui bagan mewujudkan penguatan ekonomi baru di tingkat desa dalam wadah Badan Usaha Milik Desa tersebut.

Pada dasarnya BUMDes itu dikatakan maju dan berkembang karena ada aspek pendukung. BUMDes dikatakan maju apabila mempunyai kelembagaan yang mendukung pertama, proses pendirian BUMDes yang melalui persiapan tim perumus, kajian usaha, musdes serta didukung dokumen yang lengkap. Kedua, struktur organisasi yang berjalan dengan baik adanya tim penasehat, operasional pelaksana, sudah terbentuknya unit usaha serta mempunyai karyawan/staf. Ketiga, dari pengurus BUMDes (menetapkan SK Kades) melakukan program kegiatan secara keseluruhan sesuai dengan tugasnya. Keempat, tupoksi seluruh struktur organisasi (pelaksana oprasional dan penasehat) sudah melakukan tupoksi dengan baik. Kelima, adanya kerja sama BUMDes melalui kerja sama tingkat serta pihak ketiga bagi pengembangan usaha. Keenam, adanya program kerja dan

dilaksanakan semua dengan baik. BUMDes dikatakan berkembang karena mempunyai kelembagaan proses membangun BUMDes dengan persiapan tim perumus, studi bisnis, musdes, serta tanpa didukung dokumen secara lengkap. Selanjutnya, secara struktur organisasi penasehat, pelaksana operasional, serta unit usaha sudah terbentuk. Ketiga, kepengurusan (telah ditetapkan dengan SK Kades) serta melakukan sebagian program. Keempat, adanya tupoksi yang dapat dijalankan oleh kedua stuktur organisasi (penasehat dan pelaksana operasional). Kelima kerjasama BUMDes melakukan kerjasama antar pedesaan atau dengan pihak ketiga yaitu pengembangan sebuah usaha. Keenam, suatu program kerja dan sebagian sudah dilaksanakan.

Tabel 1.

Data Total BUMDes di Pulau Jawa

No	Provinsi	Total Kabupaten	Total BUMDes
1.	Jawa Timur	30	3810
2.	DIY	4	280
3.	Jawa Tengah	29	5166
4.	Jawa Barat	19	3223

Sumber : Kementrian Desa

Pertumbuhan BUMDes di berbagai daerah Indonesia sangat penting, pemerintah mendorong secara besar-besaran dengan adanya pendirian BUMDes di tingkat desa, salah satunya dengan adanya dana desa. Wilayah yang memasuki pertumbuhan jumlah BUMDes sangat pesat yaitu Jawa Tengah.

Jumlah BUMdes Jawa Tengah termasuk BUMDes tertinggi di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 5.166 BUMDes. Salah satu kabupaten di wilayah Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap memiliki 269 Desa. Banyak sumber daya potensial yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Cilacap. Operasional ekonomi di Kabupaten Cilacap tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,15 persen lebih tinggi dari tahun yang sebelumnya. Menurut data ekonomi makro terhadap Kabupaten Cilacap, dengan adanya kontribusi besar yang berasal dari sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Cilacap (BPS Kabupaten Cilacap 2021). Seiring adanya

pertumbuhan BUMDes yang meningkat di Kabupaten Cilacap, bahwa BUMDes berkembang dan maju dikatakan ideal karena dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat secara komprehensif dan kemandirian desa. Maka diperlukan percepatan dari status BUMDes dasar ke berkembang dan tumbuh ke maju. Akan tetapi ada tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh keempat status BUMDes. Dengan demikian, kajian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai tantangan dan peluang percepatan pengembangan BUMDes menuju status berkembang dan maju di Kabupaten Cilacap.

Daerah pedesaan di berbagai negara dipengaruhi oleh proses perubahan struktural dan internasionalisasi. Menempatkan kebijakan dukungan bisnis dalam konteks lebih luas dari pembangunan pedesaan, penggunaan dana publik untuk layanan dukungan bisnis terkait kesejahteraan perekonomian secara keseluruhan dalam menciptakan ekonomi pedesaan yang produktif, berkelanjutan dan inklusif (Smallbone, Baldock, dan North 2003). Daerah pedesaan yang signifikan untuk implementasi transisi energi sebagai lokasi penerapan fasilitas terbarukan dalam menciptakan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan (Clausen dan Rudolph 2020). Pembangunan berkelanjutan berasal dari revitalisasi pedesaan, dan keberhasilan transformasi pada pembangunan sistem informasi pedesaan yang kuat dan peningkatan inovasi. Untuk mencapai revitalisasi pedesaan dapat memanfaatkan keunggulan inovasi teknologi dalam proses pengembangan pedesaan dan pertanian, serta memindahkan pembangunan pedesaan dari tradisi padat karya dan model pertumbuhan yang didorong oleh inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Yin, Chen, dan Li 2019). Peningkatan teknologi sebagai fasilitas lokal untuk menentukan tingkat pembentukan perusahaan, sehingga pentingnya aset berkontribusi pada pembentukan kebijakan pertumbuhan di daerah pedesaan (Naldi et al. 2021). Menurut (Olmedo, van Twuijver, dan O'Shaughnessy 2021) usaha sosial pedesaan sebagai organisasi yang berkontribusi pada pembangunan lokal untuk menyediakan barang/jasa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membina hubungan sosial dan tata kelola yang inklusif. Usaha sosial dapat

menawarkan pendekatan holistik untuk mengatasi masalah yang terkait di masyarakat pedesaan (Steiner dan Teasdale 2019). Hal ini menunjukkan kehadiran masyarakat dalam penciptaan dan pengembangan usaha, aspek struktur sosial, modal sosial, dan nilai-nilai budaya semua berdampak pada kegiatan usaha sosial (Valchovska dan Watts 2016). Menurut (Olmedo et al. 2021) usaha sosial merupakan komponen kunci dari pembangunan pedesaan, dimana inovasi sosial pembangunan pedesaan terdiri tiga bagian: pertama, berfokus pada proses kolektif pengelola kepentingan berbeda dengan menyesuaikan pengembangan solusi baru di daerah pedesaan. Kedua, hasil respon kebutuhan tidak terpenuhi melalui solusi baru yang menguntungkan seluruh komunitas. Dengan inovasi sosial berkontribusi pada penyediaan layanan, produk, infrastruktur/aset yang tidak dapat diakses untuk masyarakat pedesaan. Ketiga rekoneksi skala spasial yang berbeda, sehingga konektivitas (sosial-politik) penting, terutama di pedesaan yang terpinggirkan. Terkait pembangunan pedesaan, menurut (Chiangmai 2017) secara luas mengacu pada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan melalui partisipasi masyarakat terkena dampak. Hal ini menciptakan pembangunan pedesaan yang sukses dengan melibatkan organisasi dan membantu memfasilitasi pembelajaran bagi masyarakat desa. Upaya mendorong pergerakan ekonomi desa dan kewirausahaan desa menjadi strategi pengembangan dan pertumbuhan dalam kesejahteraan (Ansari et al. 2013).

Adanya kewirausahaan dalam desa dapat disalurkan melalui BUMDes yang ditingkatkan oleh pemerintah atau masyarakat pedesaan (Prabowo, 2014). Kehadiran lembaga BUMDes ini dapat diperlukan pedesaan yang lebih mandiri serta masyarakat menjadi sejahtera, Menurut (Dewi 2014), BUMDes suatu lembaga perekonomian desa yang telah berbadan hukum melalui pembentukan serta kepemilikan Pemerintah Desa, ekonomi mandiri dan kompeten dalam modal keseluruhan dari kekayaan pedesaan terpisah.

Berdasarkan hasil penelusuran terkait literatur ini, belum ada yang mendeskripsikan adanya tantangan dan peluang percepatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan gaya metode kualitatif. Menurut

(Nursan dan FR 2019) pendirian dan pengembangan BUMDes merupakan salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pendapatan Asli Desa dan perekonomian desa. Sedangkan kelebihan dari penelitian ini tidak hanya fokus terhadap satu indikator, melainkan ada tantangan dan peluang yang terdapat pada status BUMDes dari ke sembilan belas indikator. Pada penelitian-penelitian terdahulu ternyata mereka hanya fokus terhadap peningkatan perekonomian desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Menurut (Salihin 2021) pembangunan yang dapat dilakukan di daerah pedesaan dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Sedangkan, menurut (Wowor, Singkoh, dan Waworundeng 2019) secara konseptual bagi pemerintah desa jika BUMDes dapat dikelola dengan baik, maka Pendapatan Asli Desa (PADes) akan meningkat, begitu juga proses pembangunan dan kesejahteraannya.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian mendeskripsikan adanya fenomena yang terjadi pada BUMDes di Kabupaten Cilacap. Penelitian fokus pada tantangan dan peluang percepatan pengembangan BUMDes menuju status berkembang dan status maju. Jenis desa penelitian ini memakai data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan memanfaatkan instrument dalam mengumpulkan data berbentuk observasi, *based on data*, serta mengumpulkan data dengan terjun langsung kelapangan untuk mengetahui tantangan dan peluang percepatan pengembangan BUMDes di Kabupaten Cilacap. Penelitian yang terkait tantangan dan peluang BUMDes dimasukkan kedalam daftar tinjauan. Penelitian ini mengkaji tentang keberadaan BUMDes, sekaligus adanya percepatan pengembangan BUMDes di Kabupaten Cilacap yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan proses penyelenggaraan pemerintah desa. Secara sampel, kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

Tabel 2.
Objek kajian penelitian

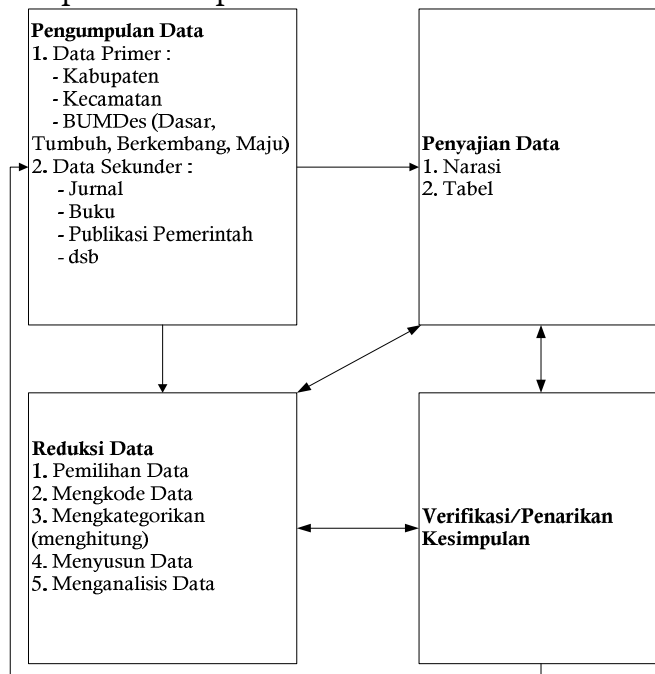
No	Objek Kajian	Banyak
1.	Kabupaten Kajian	Cilacap
2.	Total Kecamatan di Kabupaten Cilacap	24
3.	Total BUMDes di Kabupaten Cilacap	269
4.	Total BUMDes Dasar	59
5.	Total BUMDes Tumbuh	179
6.	Tota BUMDes Berkembang	27
7.	Total BUMDes Maju	4

Sumber : Data Hasil Penelitian, Diolah 2021

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan data diperoleh dengan kategori, memecah data menjadi unit-unit, menganalisis data, menyajikan serta menyusun data dalam bentuk laporan dengan pertanyaan penelitian, serta menarik kesimpulan untuk memudahkan. Oleh karena itu, jenis penelitian ini sesuai dengan yang diatas, penelitian menggunakan model interaktif (Miles, Huberman, dan Saldana 2014) untuk menganalisis data penelitian. Kegiatan analisis yang terdapat pada data kualitatif berlangsung secara interaktif serta berlanjut sampai selesai, menjenuhkan data. Model interaksinya sebagai berikut :

Gambar 1.

Komponen-komponen analisis data modal interaktif



Sumber (Miles et al. 2014)

Penelitian ini menggunakan analisis model interaktif melalui empat tahapan. Untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, adanya pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh data primer dan sekunder. Data primer yang dimana peneliti memerlukan data kabupaten, kecamatan, dan data BUMDes (dasar, tumbuh, berkembang, maju) dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku dan publikasi pemerintah, dsb. Hal ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian. Kedua, reduksi data yang dapat dilakukan pengkajian untuk pemilihan data sesuai dengan status, variabel, dan nilai masing-masing indikator BUMDes. Kemudian mengkode hasil pemilihan data pada nilai indikator dengan memberi kode sangat kuat untuk score 4, kuat score 3, lemah score 2, dan sangat lemah score 1. Serta memberi kode peluang dan tantangan untuk hasil penghitungan nilai indikator BUMDes. Peneliti mengkategorikan (menghitung data) dari hasil kode nilai indikator BUMDes untuk menjadi data peluang dan tantangan, yang dimana dari setiap kode sangat kuat dan kuat ditambahkan menjadi peluang, serta lemah dan sangat lemah ditambahkan menjadi tantangan.

Peneliti melakukan penyusunan data yang sudah dikategorikan dengan cara membandingkan hasil dari peluang dan tantangan BUMDes dasar dengan berkembang, BUMDes tumbuh dengan maju. Kemudian melakukan analisis data untuk mendapatkan hasil yang tajam, ringkas, fokus, serta menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir. Hal ini dilakukan berulang kali hingga laporan akhir lengkap tersusun. Ketiga penyajian data, peneliti melakukan penyajian data menggunakan bentuk tabel, kemudian diuraikan menjadi narasi yang didukung dengan informasi dan data yang sudah ada. Sehingga peneliti dapat memahami dan merencanakan tindakan selanjutnya. Ketiga, penarikan kesimpulan, selama menulis peneliti melakukan tinjauan ulang catatan-catatan lapangan dan jurnal-jurnal yang menjadi informasi, serta melakukan tukar pikiran dengan teman untuk mengembangkan ide-ide dalam penelitian ini. Kesimpulan terjadi karena didukung oleh bukti-bukti (data) valid dan konsisten yang ditemukan dilapangan.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini terkait hasil proses metodologi penelitian deskriptif kualitatif dalam teknik analisis data interaktif model. Berdasarkan data-data BUMDes yang sudah diolah, maka penelitian ini menjadi dua bagian. Pertama, terkait tantangan dan peluang percepatan pengembangan status BUMDes dari dasar menuju berkembang. Kedua, tantangan dan peluang percepatan pengembangan status BUMDes dari tumbuh menuju maju. Oleh karena itu, hasil pengolahan data BUMDes dasar dan berkembang dari sembilan belas indikator mendapatkan kesimpulan. Dapat dilihat lebih jelas untuk tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3.

Hasil Tantangan dan Peluang Bumdes Dasar dan Berkembang

Nama Indikator	Dasar		Kesimpulan	Berkembang		Kesimpulan
	Peluang (+)	Tantangan (-)		Peluang (+)	Tantangan (-)	
Unit Usaha	12	47	Tantangan	27	0	Kekuatan
Pasar	1	58	Tantangan	6	21	Kelemahan
Keberlanjutan	24	35	Tantangan	27	0	Kekuatan
Proses Pendirian BUMDes	25	34	Tantangan	25	2	Kekuatan
Struktur Organisasi	36	23	Peluang	27	0	Kekuatan
Kepengurusan	20	29	Tantangan	27	0	Kekuatan
Tupoksi	7	52	Tantangan	27	0	Kekuatan
Kerjasama	1	58	Tantangan	16	11	Kekuatan
Program Kerja	13	46	Tantangan	26	1	Kekuatan
Dampak Ekonomi	49	10	Peluang	27	0	Kekuatan
Dampak Sosial	7	52	Tantangan	26	1	Kekuatan
Dampak Bagi Pembangunan Desa	0	59	Tantangan	26	1	Kekuatan

Modal	1	58	Tantangan	5	22	Kelemahan
Inventaris	6	53	Tantangan	22	5	Kekuatan
Aset	1	58	Tantangan	3	24	Kelemahan
Peraturan BUMDes	0	59	Tantangan	24	3	Kekuatan
Pembukuan	13	46	Tantangan	26	1	Kekuatan
Laporan	0	59	Tantangan	23	4	Kekuatan
Pertanggungjawaban	0	59	Tantangan	17	10	Kekuatan

Sumber : Data Hasil Penelitian, Diolah 2021

Berdasarkan hasil dari ke sembilan belas indikator BUMDes di Kabupaten Cilacap seperti yang terlihat pada tabel 3, terlihat kelemahan pada indikator pasar menjadi tantangan BUMDES untuk berkembang. Dari sebagian besar BUMDes hanya memiliki cakupan pasar yang terbatas, yaitu desa. Kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dapat menyebabkan kurangnya upaya untuk bersama-sama mengembangkan BUMDes. Adanya keterlibatan masyarakat yang dapat menciptakan rasa saling memiliki dan tanggungjawab terhadap kelangsungan usaha BUMDes. Sebelum optimalnya *engagement* dari masyarakat sekitar, rendahnya intensitas kerjasama antara BUMDes dengan BUMDes lainnya maupun dari pihak ketiga di Kabupaten Cilacap menjadi kendala dalam jangkauan pemasaran terbatas. Kelemahan juga pada indikator Modal dan aset yang menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan BUMDes, jumlah modal usaha yang di miliki BUMDes di Kabupaten Cilacap berikisar hanya puluhan juta sampai ratusan juta rupiah, yang dimana sebagian besar dari BUMDes itu sendiri hanya mempunyai aset kurang dari 200 juta. Bahkan modal usaha BUMDes pada dasarnya hanya penyertaan modal desa, namun jumlah yang diberikan relatif kecil untuk mengelola sebuah usaha. Hal ini menandakan rendahnya komitmen untuk mengembangkan BUMDes. Nilai modal yang terdapat dalam usaha BUMDes biasanya berupa anggaran atau SILPA APBD Desa. Situasi ini dapat berdampak lemah terhadap kepemilikan aset yang ada pada BUMDes. Maka dari itu banyaknya jumlah BUMDes di Kabupaten Cilacap belum

memiliki kantor tetap dan inventaris yang belum memadai. Bahkan dengan rendahnya modal menjadi kendala utama dalam hal menggaji pengurus. Hal ini bisa menyebabkan minimnya akuntabilitas bagi pengurus dalam hal pengelolaan BUMDes. Hasil pengolahan data BUMDes tumbuh dan maju dari sembilan belas indikator juga mendapatkan kesimpulan, sebagai berikut :

Tabel 4.

Hasil Tantangan dan Peluang Bumdes Tumbuh dan Maju

Nama Indikator	Tumbuh		Kesimpulan	Maju		Kesimpulan
	Peluang (+)	Tantangan (-)		Peluang (+)	Tantangan (-)	
Unit Usaha	145	34	Peluang	4	0	Kekuatan
Pasar	13	166	Tantangan	3	1	Kekuatan
Keberlanjutan	140	39	Peluang	4	0	Kekuatan
Proses Pendirian BUMDes	129	50	Peluang	4	0	Kekuatan
Struktur Organisasi	156	23	Peluang	4	0	Kekuatan
Kepengurusan	172	7	Peluang	4	0	Kekuatan
Tupoksi	116	63	Peluang	4	0	Kekuatan
Kerjasama	34	145	Tantangan	3	1	Kekuatan
Program Kerja	127	52	Peluang	4	0	Kekuatan
Dampak Ekonomi	176	3	Peluang	4	0	Kekuatan
Dampak Sosial	111	68	Peluang	4	0	Kekuatan
Dampak Bagi Pembangunan Desa	37	142	Tantangan	4	0	Kekuatan
Modal	13	166	Tantangan	3	1	Kekuatan
Inventaris	74	105	Tantangan	4	0	Kekuatan
Aset	7	172	Tantangan	1	3	Kelemahan
Peraturan BUMDes	63	116	Tantangan	4	0	Kekuatan

Pembukuan	167	12	Peluang	4	0	Kekuata n
Laporan	44	135	Tantang a n	3	1	Kekuata n
Pertanggungja w aban	26	153	Tantang a n	4	0	Kekuata n

Sumber : Data Hasil Penelitian, Diolah 2021

Berdasarkan hasil dari ke sembilan belas indikator BUMDes di Kabupaten Cilacap seperti yang terlihat pada tabel 4, bahwa adanya kelemahan yang terdapat pada indikator aset menjadi tantangan terbesar BUMDes di Kabupaten Cilacap untuk menuju status tumbuh ke status maju. Dimana BUMDes di Kabupaten Cilacap terdapat kesulitan dalam melakukan perkembangan usaha baru serta terbatasnya inovasi.

Penutup

Hasil dari penelitian dapat menunjukkan dari banyaknya jumlah BUMDes di Kabupaten Cilacap mempunyai berbagai hambatan yang berpotensi pada pengelolaan BUMDes. Permasalahan pengelolaan BUMDes ditemukan di semua dimensi kriteria pengembangan BUMDes, yaitu : cakupan pasar yang masih terbatas, keterbatasan modal dan aset. Sedangkan dari kriteria tumbuh dan maju yang menjadi titik kelemahan yaitu pada indikator aset. Hal ini disinyalir terdapat kesulitan untuk melakukan pengembangan suatu usaha yang baru dan adanya keterbatasan dalam inovasi melalui pengembangan produk lokal.

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Cilacap yaitu sebagai berikut : Pengurus BUMDes yang ada di Kabupaten Cilacap harus memperhatikan para masyarakat dalam membangkitkan rasa sosialisasi dan partisipasi untuk membangun BUMDes bersama menuju lebih baik dan maju. Diharapkan bagi pengurus lembaga BUMDes lebih meningkatkan komitmen untuk mengembangkan BUMDes, terutama dalam urusan pengelolaan sebuah usaha. Diharapkan pengurus lembaga BUMDes lebih bertanggung jawab dari berbagai hal terutama dalam pengelolaan BUMDes.

Dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan atau penelitian yang lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Ansari, Bahareh, Seyed Mehdi Mirdamadi, Azita Zand, dan Masoumeh Arfaee. 2013. "Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas." *Research Journal of Environmental and Earth Sciences* 5(1):26–31. doi: 10.19026/rjees.5.5635.
- BPS Kabupaten Cilacap. 2021. "Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2021." 1–398.
- Chiangmai, Chartchai Na. 2017. "Creating efficient collaboration for knowledge creation in area-based rural development." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 38(2):175–80. doi: 10.1016/j.kjss.2016.08.014.
- Clausen, Laura Tolnov, dan David Rudolph. 2020. "Renewable energy for sustainable rural development: Synergies and mismatches." *Energy Policy* 138:111289. doi: 10.1016/j.enpol.2020.111289.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2014. "PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADeS) SERTA MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA." V(1):1–14.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Third. United States of America: SAGE Publication.
- Naldi, Lucia, Pia Nilsson, Hans Westlund, dan Sofia Wixe. 2021. "Amenities and new firm formation in rural areas." *Journal of Rural Studies* 85(April 2020):32–42. doi: 10.1016/j.jrurstud.2021.05.023.
- Nurkholis, Nurkholis, Istifianah Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman. 2020. "Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5(1):25–36. doi: 10.47200/jnajpm.v5i1.419.
- Nursan, Muhammad, dan Aeko Fria Utama FR. 2019. "STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERBASIS PERTANIAN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT." *SEA* 8(2).
- Olmedo, Lucas, Mara van Twuijver, dan Mary O'Shaughnessy. 2021. "Rurality as context for innovative responses to social challenges – The role of rural social enterprises." *Journal of Rural Studies* (February). doi: 10.1016/j.jrurstud.2021.04.020.
- Prabowo, T. Handono Eko. 2014. "Developing bumdes (village-owned enterprise) for sustainable poverty alleviation model village community study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia." *World Applied Sciences Journal* 30(30 A):19–26. doi: 10.5829/idosi.wasj.2014.30.icmrp.4.
- Salihin, Agus. 2021. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7(1):96. doi: 10.29300/ajj.v7i1.3937.

- Smallbone, David, Robert Baldock, dan David North. 2003. "Policy support for small firms in rural areas: The English experience." *Environment and Planning C: Government and Policy* 21(6):825–41. doi: 10.1068/c0316.
- Steiner, Artur, dan Simon Teasdale. 2019. "Unlocking the potential of rural social enterprise." *Journal of Rural Studies* 70(December 2017):144–54. doi: 10.1016/j.jrurstud.2017.12.021.
- Ubi Laru, Ferdi Harobu, dan Agung Suprojo. 2019. "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8(4):367–71. doi: 10.33366/jisip.v8i4.2017.
- Valchovska, Stela, dan Gerald Watts. 2016. "Interpreting Community-Based Enterprise: A Case Study from Rural Wales." *Journal of Social Entrepreneurship* 7(2):211–35. doi: 10.1080/19420676.2016.1158731.
- Wowor, Mario, Frans Singkoh, dan Welly Waworundeng. 2019. "PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO." *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3(3):1–11.
- Yin, Ximing, Jin Chen, dan Jizhen Li. 2019. "Rural innovation system: Revitalize the countryside for a sustainable development." *Journal of Rural Studies* (July):0–1. doi: 10.1016/j.jrurstud.2019.10.014.

